

Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

Burhanudin Ata Gusman
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Email: burhanudin1900331046@webmail.uad.ac.id

Abstract: Policies arise because there are problems that require action to address them properly. Education policy is the process of formulating reforms in actions that are easily accepted with common sense in solving educational problems. This study uses a literature study with qualitative methods. In collecting data using various sources from journals. The purpose of this study is to find out how education policy is in the old, new and reform eras. The results of the research show that during the New Order, the curriculum structure was valid from 1945 to 1950, namely the lowest education, teacher education, general education, vocational education, technical pedagogy, technical high school, higher education, republican higher education, higher education in the Dutch occupied areas. In the old order there was a curriculum from 1945 to 1968, lesson plans without problems in 1952, a 1964 curriculum, while in the new order the curriculum was 1967, 1975, 1984, 1994, while competency-based reforms, the 2006 and 2013 curriculum were needed. -policies contained in the old order until now, so that we know the history of education policies from the old order to the current reform

Kata Kunci: Policy, Old Order, New Order, Reform

Abstrak: Kebijakan muncul karena ada masalah yang membutuhkan tindakan untuk mengatasinya dengan baik. Kebijakan pendidikan adalah proses merumuskan reformasi dalam tindakan yang mudah diterima dengan akal sehat dalam memecahkan masalah pendidikan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode kualitatif. Dalam mengumpulkan data menggunakan berbagai sumber dari jurnal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pendidikan di era lama, baru dan reformasi. Hasil penelitian menunjukan masa orde baru struktur kurikulum berlaku 1945 sampai 1950 orde lama yaitu sebagai pendidikan terendah, pendidikan guru, pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pedagogi teknis, sekolah menengah teknik, pendidikan tinggi, pendidikan tinggi republik, pendidikan tinggi di daerah pendudukan belanda. Pada orde lama terdapat kurikulum tahun 1945 sampai 1968, rencana pelajaran tanpa masalah pada tahun 1952, kurikulum 1964, sedangkan di orde baru kurikulum 1967, 1975, 1984, 1994, sedangkan reformasi berbasis kompetensi, kurikulum kts 2006, dan 2013. Hal tersebut perlu memahami kebijakan-kebijakan yang terdapat pada orde lama hingga sekarang, sehingga kita tahu sejarah kebijakan Pendidikan masa orde lama hingga reformasi saat ini.

Kata Kunci: Kebijakan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi

Pendahuluan

Kebijakan serta perkembangan Pendidikan di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari yang namanya perkembangan sejarah bangsa Indonesia serta kebijakan Pendidikan dari period eke periode, dari sebelum Indonesia merdeka sampai era reformasi saat ini. Panjangnya perjalanan sejarah Pendidikan islam di Indonesia telah memberi warna tersendiri terhadap Pendidikan tanah air Indonesia. Berhubungannya lembaga Pendidikan ke dalam sistem nasional Pendidikan, secara

umpan balik telah mendapatkan pengaruh besar terhadap pihak masing-masing. Kebijakan merupakan hal yang bisa bertujuan pada politik, maksudnya kebijakan Pendidikan adalah manifestasi dari berbagai kegiatan politik sendiri yang dapat membuat daya jual terhadap suatu tujuan yang dicapai.¹

Menurut pandangan banyak yang menilai bahwa zaman sebelum kemerdekaan Indonesia sampai saat ini masa reformasi, kebijakan pada Pendidikan diterapkan dengan cara membedakan serta tidak adil merata, walaupun upaya agar dapat mendorong perubahan serta kemajuan Pendidikan islam harus terus diterapkan hingga datangnya UUSPN nomor 20 tahun 2003. Tetapi sebelum membahas terkait topik diatas, baiknya penulis menjelaskan secara detail makna dari kebijakan Pendidikan islam ini. Bahwa kebijakan merupakan berbagai aktivitas yang memiliki tujuan yang pastinya diiringi para pelaku supaya dapat memecahkan permasalahan, atau juga dapat diartikan bahwa kebijakan ialah kumpulan putusan seseorang yang diambil oleh kelompok politik untuk usaha memilih cara-cara serta tujuan agar tercapainya suatu tujuan.²

Kebijakan dalam Pendidikan islam Indonesia³ yaitu kebijakan politik atau dapat kita sebut dengan kebijakan publik. Bahwa kebijakan publik merupakan berbagai aktivitas kegiatan yang mana seseorang mengajukan kelompok maupun pemerintahan dengan bermaksud agar bisa mencapai apa yang menjadi tujuan. Tidak hanya itu kebijakan publik ini juga dapat diartikan dengan hasil keputusan yang diambil dari manajemen puncak berupa prinsip, tujuan maupun dalam memilih masa depan organisasi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu bahwa kebijakan itu sulit untuk dipisahkan terkait kebijakan dengan persepsi dan paradigma publik. Begitu juga sebaliknya penerapan kebijakan Pendidikan sangat berdampak terhadap politik dalam kehidupan.⁴

¹ I Yuniarti, N Khodijah, and ..., "Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah," *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 9, no. 1 (2022): 182-207, <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/1148>.

² E & Irama Herawati, "Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Lembaga Pendidikan DI Indonesia," *TADARUS: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. September (2021): 2086-9118.

³ A F Sabiq, "Kebijakan Politik Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Indonesia," *Lentera: Jurnal Diklat Keagamaan Padang* 5, no. 2 (2021): 1-14, <https://lentera.kemenag.go.id/index.php/lentera/article/view/28>.

⁴ Afida Nurrisqi, "Karakteristik Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Perspektif Kebijakan Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Dan Sains* 3, no. 1 (2021): 124-41, <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>.

Dari berbagai pengertian diatas yang berkesinambungan dengan public bisa diartikan sebagai aturan yang disahkan serta dirumuskan melewati proses pejabat public yang mengambil keputusan tersebut bisa juga pejabat yang didalamnya mengelola pemerintahan yang berkaitan dengan Pendidikan agama islam dengan maksud serta memiliki tujuan-tujuan tertentu yang akan dicapai dari Pendidikan islam tersebut.⁵

Sedangkan Pendidikan agama islam merupakan suatu proses yang mana dapat merubah pola perilaku seseorang menjadi yang lebih baik, proses tersebut dilakukan dengan yang Namanya Pendidikan serta pembelajaran sebagai suatu hal yang bisa mengubah perilaku.⁶ Berdasarkan definisi diatas, penulis dalam hal ini akan membahas terkait bagaimana kebijakan Pendidikan islam di Indonesia dari masa orde baru, orde lama sampai masa era reformasi

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan analisis dokumen untuk melakukan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode analisis isi untuk memberikan pemahaman isi secara detail. Metode analisis isi digunakan untuk mempelajari perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis komunikasinya. Misalnya: buku, teks, surat kabar, novel, lagu, gambar, iklan dan segala macam komunikasi yang dapat dianalisis. Karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan, metode pengumpulan datanya menggunakan pengumpulan data kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan materi pelajaran. Penulis kemudian meneliti dan menentukan fokus pembahasan dari pengumpulan data tersebut. Data primer berasal dari buku, jurnal, dan sumber lainnya.⁷

Hasil Penelitian dan Pembahasan

⁵ Heni Yuningsih, "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Ode Baru," *JURNAL TARBIYA* Volume: 1, no. 1 (2018): 15-33.

⁶ Syafrizal Fuady, "Berbagai Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia Pra-Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru (Skb 3 Menteri), Era Reformasi Dan Kecenderungan Masing-Masing Zaman," *TARBIYATUL MISBAH (Jurnal KAJIAN ILMU PENDIDIKAN)* 12, no. 2 (2019): 1-31.

⁷ Mustarsyidah Zayyini Rusyda, "Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam Di Indonesia," *Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 2 Issue 2, no. Optimalisasi, pendidikan pesantren, kebijakan (2021): 167-80.

Pada masa kemerdekaan hingga Orde Lama

Usaha pemerintah penting untuk Indonesia, yang mana pada mulanya dipimpin oleh tokoh yang pernah berjasa pada masa penjajahan.⁸ Tokoh-tokoh tersebut menjadi menteri pendidikan selama ini. Pada kongres pendidikan, Menteri Pendidikan dan Pengajaran membentuk panitia untuk menyusun RUU tentang pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk mengembangkan pendidikan nasional yang berbasis budaya Indonesia. Pendidikan nasional memiliki tujuan yaitu agar menghasilkan warga negara yang mampu bekerja sama dan berkontribusi pada negaranya, serta memiliki rasa patriotisme yang kuat. Praktik pendidikan tidak dapat dipisahkan dari berbagai lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan lain di mana ia terjadi.⁹

Tujuan pelatihan pada saat wirausaha adalah ini Menyelesaikan tatanan kehidupan dan perkembangan. Tujuan ini menghadapi kendala. Artinya, penjajah Belanda ingin dijajah kembali, dan rakyat Indonesia harus berjuang lagi secara politik dan fisik. Di negara bagian ini, pemerintah mulai mempersiapkan sistem pendidikan nasional.

Pada kewajiban UUD 1945, Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K) mengeluarkan "Petunjuk Umum" bagi para guru untuk meninggalkan sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Komisi Penyusun Undang-Undang (RUU) Pendidikan dan Pengajaran. Pembahasan RUU di Badan Kerja Komite Nasional Indonesia Pusat dihentikan setelah pecahnya perang kolonial kedua Peristiwa ini baru bisa terjadi pada tanggal 29 Oktober 1949. Pada tanggal 5 April 1950, RUU tersebut disahkan sebagai Undang-Undang Nomor Rhode Island. Empat makalah tentang Pendidikan Dasar dan Pengajaran di Sekolah diterbitkan pada tahun 1950. Rhode Island Law No. adalah undang-undang yang mengatur sistem hukum di Rhode Island. Undang-undang No.4 Tahun 1950 kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 27 Januari 1954,

⁸ Miftahur Rohman, "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang," *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 02, no. Kebijakan Pendidikan Islam (2018): 15-33.

⁹ Mohammad Kosim, "Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Pada Masa Orde Lama," *Karsa* 22, no. 1 (2014).

kemudian disahkan oleh pemerintah pada tanggal 12 Maret 1954, dan diundangkan pada tanggal 18 Maret 1954 sebagai Undang-Undang No. Tahun 1954, ada 12 bulan.¹⁰

Sekalipun telah terjadi perubahan bentuk dan konstitusi negara sejak tahun 1945, UUD 1945 tetap menjadi konstitusi negara sampai akhirnya terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang memberlakukan UUD RIS. Ketetapan No.4 Tahun 1950 sebenarnya dijadikan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, kebudayaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mempersatukan negara. Dalam undang-undang nomor (masukkan nama undang-undang di sini), disebutkan bahwa untuk membentuk manusia yang cakap.¹¹

Struktur sekolah awal kemerdekaan dan kurikulum pendidikan

Struktur sekolah Indonesia pasca kemerdekaan didasarkan pada satu jenis Sekolah tiga jenjang pendidikan tetap berjalan seperti di Jepang, tetapi RPP-nya hampir sama dan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengajaran sekolah tersebut. Buku teks yang digunakan adalah buku terjemahan dari bahasa Belanda yang telah dirintis sejak zaman Jepang. zaman, ke dalam bahasa Indonesia. Struktur dan kurikulum sekolah yang berlaku dari tahun 1945-1950 adalah sebagai berikut:

1. Disebut sebagai pendidikan terendah

Di Indonesia sejak awal kemerdekaan pendidikan rendah, Di Sekolah Rakyat (SR), masa pendidikan tiga tahun. Tujuan didirikannya SR ini bukan hanya untuk menaikkan jenjang pendidikan sebelum kemerdekaan, tetapi juga untuk bersekolah. Mengingat silabus SR diatur sesuai dengan keputusan Menteri PKK tanggal 19 November 1946 No. 1153/Bhg A yang menyebutkan daftar pelajaran bahasa Inggris yang fokusnya adalah pelajaran bahasa aritmatika dari 38 jam pelajaran per minggu, 8 jam bahasa Indonesia, 4 jam bahasa daerah dan 17 jam berhitung dialokasikan untuk kelas IV<V dan VI. Tercatat ada 24.775 SR pada akhir tahun 1949 di seluruh Indonesia.

2. Pendidikan guru

¹⁰ Muhammad Sholeh Hoddin, "Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi.," *Jurnal Ilmiah Iqra'* 14, no. 1 (2020): 15, <https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035>.

¹¹ Sarfika Datumula, "Peraturan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, Dan Kabinet Kerja," *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2021): 56-78, <https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.27>.

Ada tiga jenis pendidikan guru selama periode 1945-1950 Yaitu:

- a. Sekolah Guru B adalah sekolah dalam waktu empat tahun yang menyediakan pendidikan untuk guru sekolah umum. Siswa yang diterima di sekolah SR biasanya lulusan SR yang telah lulus ujian masuk SMA. Pelajaran yang diberikan di kelas umum I, II, III bersifat umum, sedangkan pendidikan guru baru ditawarkan di kelas IV khusus. Untuk kelas IV, lulusan SMP juga diterima, dan SPG dipimpin oleh kepala sekolah yang membawahi sejumlah guru, beberapa di antaranya adalah staf non-reguler, karena kekurangan guru reguler.
- b. Sekolah Guru C (SGC) Karena kebutuhan guru SR yang mendesak, maka perlu dibuka sekolah guru yang dapat menghasilkan dalam waktu singkat. Maka didirikanlah sekolah guru dua tahun setelah SR dan disebut SGC, namun karena dirasa kurang bermanfaat maka ditutup kembali dan sebagian dialihfungsikan menjadi SGB.
- c. Sekolah Pendidikan A (SGA) Karena asumsi bahwa 4 tahun studi guru tidak menjamin pengetahuan yang cukup untuk kualifikasi guru, SGA dibuka dan menawarkan tiga tahun studi pascasarjana. Atau, lulusan SGB Grade III juga dapat diterima. Dokumen yang disediakan untuk SGA adalah jenis yang sama dengan yang disediakan untuk SGB, hanya implementasinya lebih luas dan lebih mendalam.

3. Pendidikan umum

Terdapat Ada dua jenis pendidikan umum, yaitu

- a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sama dengan zaman Jepang, sekolah menengah pertama menggunakan kurikulum yang sama, tetapi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri PPK pada tahun 1946, pembagian A dan B dimulai di Kelas II untuk mendapatkan nilai IIA, IIB, IIIA dan IIIB. Bagian A juga berisi beberapa ilmu alam dan ilmu pasti. Tetapi yang lain menerima kursus bahasa dan praktik utama. Di sisi lain, di bagian B, ilmu alam dan eksakta diberikan.
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMT), Kementerian PPK secara langsung mengelola SMAT di Pulau Jawa, khususnya sekolah-sekolah di kota-kota

seperti: Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan Cirebon. SMT di luar Jawa berada di bawah kewenangan pemerintah daerah karena sulitnya berkomunikasi dengan pusat. SMT adalah bentuk pendidikan pasca sarjana 3 tahun dan setelah lulus dapat melanjutkan ke universitas. RPP tidak jelas dan yang diberikan hanya RPP. Karena saat itu mereka masih harus beradaptasi dengan kondisi yang labil saat itu. Oleh karena itu, rencana pembelajaran yang ditempuh adalah: (1) isi memenuhi kebutuhan nasional, (2) bahasa pengantar bahasa Indonesia, (3) mutunya setingkat SMT sebelum kemerdekaan. Ujian akhir dapat diadakan oleh masing-masing sekolah selama tidak ada ujian negara, tetapi hanya setelah tahun 1947 ujian negara mulai berlaku.

4. Pelatihan kejuruan

Pendidikan vokasi yaitu sebagai berikut

a. Pendidikan Ekonomi

Pada awal kemerdekaan, pemerintah baru membuka sekolah komersial lama, dan pengajaran dilakukan 3 tahun setelah sekolah populer. Sekolah perdagangan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi atau akuntansi, sedangkan pemeriksaan sekolah perdagangan disediakan oleh pengawas sekolah perdagangan.

b. Pendidikan wanita

Setelah kemerdekaan, pemerintah membuka Sekolah Kecerdasan Putri (SKP) dan pada tahun 1947 Sekolah Guru Kecerdasan Putri (SGKP) berlangsung empat tahun setelah SMP atau SKP.

5. Pedagogi Teknis

a. Kursus Kerajinan Negeri (KKN), sekolah/kursus satu tahun dan program pelatihan teknis terendah berdasarkan SR enam tahun. KKN mencakup spesialisasi: kayu, besi, jalinan, furnitur, las dan batu.

b. Sekolah Insinyur Pertama (STP), yang bertujuan untuk melatih perajin yang terampil tetapi dengan pengetahuan teoritis. Durasi pelatihan ini adalah dua tahun setelah SR dan mencakup spesialisasi berikut: kayu, batu, keramik, furnitur, mengepang, besi, listrik, otomotif, percetakan, tekstil kulit, sepeda

motor, survei dan pengecoran.

- c. Sekolah Teknik (ST), untuk melatih pengawas gedung. Masa pendidikan dua tahun setelah STP atau SMP bagian B dan mencakup spesialisasi berikut: konstruksi, konstruksi air dan jalan, konstruksi radio, pembuatan kapal, percetakan dan pertambangan.

6. Sekolah Menengah Teknik (STM)

Bertujuan untuk melatih para ahli teknis dan staf teknis menengah. Periode pelatihan adalah 4 tahun setelah bagian B atau ST SMP dan mencakup spesialisasi berikut: konstruksi bangunan, konstruksi sipil, pembuatan kapal, pembuatan mesin, pembuatan mesin, teknik elektro, pembuatan mesin kapal kelautan, kimia dan penerbangan. Pelatihan guru sekolah teknik, untuk memenuhi kebutuhan guru sekolah teknik, dibuka sekolah/kursus untuk melatih guru produksi:

- a. Gelar Teknik (KGSTP) untuk mengajar penuh waktu di STP dengan jurusan: Teknik Sipil, Mesin, Listrik dan Percetakan.
- b. Diploma B I Teknik (KGST) untuk mengajar penuh waktu di ST/STM kelas I fakultas teknik sipil, gedung dan mesin.
- c. Insinyur tingkat B II mengajar di STM fakultas teknik sipil, gedung, permesinan dan kelistrikan.¹²

7. Pendidikan Tinggi

Selama kurun waktu 1945-1950, kemungkinan melanjutkan pendidikan tinggi semakin terbuka bagi warga yang tidak mampu. Lembaga pendidikan ini berkembang pesat, tetapi karena pelaksanaannya, perjuangan fisik dilakukan, kelas sering terganggu oleh perjuangan garis depan. Institusi pendidikan yang ada adalah Universitas Gajah Mada, beberapa SMA dan institut di Jakarta (pemukiman) Klaten, Solo dan Yogyakarta.

8. Pendidikan tinggi republik

Sejak awal kemerdekaan di Jakarta pada masa pendudukan Belanda, telah didirikan sekolah kedokteran sebagai kelanjutan dari zaman Ika Daigaku Jepang. Pada bulan November 1946, Sekolah Tinggi Hukum serta Filsafat dan Sastra juga

¹² Riska and Hudaidah, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Kondisi Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945 - 1966)," *Jurnal Ilmiah Pendidikan* 3, no. 3 (2021): 824-29.

dibuka. Setelah invasi militer I, dua perguruan tinggi terakhir ditutup oleh Belanda dan tidak ada lagi secara resmi, sehingga perguruan tinggi pada waktu itu dibagi menjadi dua, yaitu Perguruan Tinggi Republik dan Perguruan Tinggi Masa Pendudukan Belanda. Tapi kuliah tetap di rumah guru, jadi semacam kuliah privat. Sebelum invasi militer pertama ke Malang, ada juga lembaga pendidikan tinggi republik. Demikian pula, ada sekolah tinggi teknik kedokteran hewan di Bandung yang telah dipindahkan ke Yogyakarta.

9. Pendidikan Tinggi di Daerah Pendudukan Belanda

Atas prakarsa Belanda, pada Januari 1946 didirikan universitas darurat (NOOD Universiteit) yang terdiri dari lima fakultas, yaitu fakultas Kedokteran, Hukum, Sastra dan Filsafat dan Pertanian di Jakarta dan Fakultas Teknik di Bandung. Pada bulan Maret 1947, oleh pemerintah Belanda, nama universitas darurat tersebut resmi diubah menjadi nama Universitas Indonesia (Universiteit Van Indonesia). Pada tahun 1947, universitas juga berkembang dengan fakultas ilmu alam dan eksakta di Bandung, kedokteran hewan di Bogor, kedokteran di Surabaya dan ekonomi di Makassar (Ujung Pandang). Pada bulan Maret 1948, fakultas pertanian dipindahkan ke Bogor.

Pendidikan orde lama

Secara umum pengajaran pada masa orde lama sebagai bentuk penafsiran pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno sudah cukup memberikan ruang bebas bagi siswa pendidikan. Pemerintahan yang berlandaskan sosialisme menjadi acuan dasar bagaimana pendidikan akan digagas dan dikelola untuk pembangunan dan kemajuan Indonesia ke depan. Pada prinsipnya, konsep sosialisme dalam pendidikan memberikan dasar bahwa pendidikan adalah hak semua kelompok masyarakat, tanpa memandang kelas sosialnya. Saat itu, Indonesia mampu mengekspor guru ke negara tetangga dan banyak anak muda yang dikirim untuk belajar ke luar negeri dengan tujuan agar suatu saat bisa kembali ke tanah air untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat. Tidak ada hambatan ekonomi yang menghalangi seseorang untuk bersekolah, karena diskriminasi dipandang sebagai tindakan kolonialisme. Pada saat ini adalah saat di mana setiap orang merasa setara dengan orang lain, dan setiap orang berhak atas pendidikan. Orde lama berusaha

membangun masyarakat madani yang kuat, berdasarkan demokrasi, persamaan hak dan kewajiban antar warga negara, termasuk di bidang pendidikan.¹³

Banyak pemikir yang lahir saat ini, karena ruang kebebasan benar-benar terbuka dan tidak ada yang mendikte siswa. Tidak ada nuansa kepentingan politik dari industri tertentu untuk menjadikan pendidikan sebagai alat negara atau pemerintah yang dominan. Soekarno pernah berkata, "... alangkah hebatnya jika setiap guru di student garden university menjadi Rasul Kebangkitan! Hanya seorang guru yang dadanya penuh dengan jiwa yang terbangun yang dapat "mengirim" kebangkitan ke dalam jiwa anak.

Dari kata-kata Soekarno, sangat jelas bahwa pemerintahan rezim lama sangat mementingkan pembangunan bangsa melalui pendidikan. Di bawah kepemimpinan Menteri Pendidikan, Ki Hadjar Dewantara, telah dikembangkan sistem pendidikan "antar" yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, alam, budaya, suku, dan kemanusiaan yang dikenal sebagai "Panca Dharma Taman Siswa" dan semboyan "ing ngarso". sung tulodho, ing madyo mangun karso". , tut wuri handayani "pada tahun 1950 diundangkan peraturan pendidikan nasional pertama yaitu undang-undang nomor 4 tahun 1950, kemudian disempurnakan (jo) menjadi undang-undang nomor 12 tahun 1954 tentang pendidikan dan mengajar di sekolah-sekolah. Pada tahun 1961, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Pendidikan Tinggi disusul dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Pada akhir pendidikan Presiden Soekarno, 90% penduduk Indonesia mengenyam pendidikan dasar. Kurikulum sekolah pada masa Orde Lama adalah sebagai berikut:

a. Rentang 1945-1968

Program pertama lahir pada masa kemerdekaan menggunakan istilah Belanda "leer plan" yang berarti rencana pelajaran. Perubahan orientasi pendidikan lebih bersifat politis, bergerak dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Tapi sebaliknya, Pancasila adalah asas pendidikan. Kurikulum saat ini

¹³ Muhammad Sabarudin, "Pola Dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal Dan Sebelum Kemerdekaan," *TARBIYA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2015): 139-74, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jurnal-tarbiya/article/view/141>.

dikenal sebagai 'Studi Tahun 1947', yang baru diterapkan pada tahun 1950. Fokus Kurikulum 1947 tidak menekankan pada pendidikan spiritual'. Prioritasnya adalah pendidikan karakter, kesadaran bernegara dan masyarakat. Saat itu, mahasiswa lebih fokus bagaimana berintegrasi dengan masyarakat. Proses pendidikan sangat kental dengan kehidupan sehari-hari. Aspek emosional dan psikologis lebih ditekankan dengan pemberian kursus seni dan pendidikan jasmani. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana menciptakan rasa bela negara.

b. Rencana pelajaran tanpa masalah pada tahun 1952

Silabus ini dipecah menjadi lebih detail untuk setiap mata pelajaran, yang disebut "Silabus Tidak Berpelumas tahun 1952". Kurikulumnya sangat jelas dan satu guru mengajar satu mata pelajaran. Pada saat itu, kebutuhan pengetahuan siswa lebih diperhatikan dan unit pengajaran juga lebih rinci. Namun, dalam program ini, siswa tetap diposisikan sebagai objek karena guru merupakan aktor sentral dalam transmisi pengetahuan. Guru menentukan apa yang akan dicapai siswa di dalam kelas, dan guru juga menentukan standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan.

c. Kurikulum 1964

Kurikulum 1964 menitikberatkan pada pengembangan kreativitas, minat, karsa, kerja keras, dan akhlak (Panca wardhana). Mata pelajaran dikelompokkan menjadi lima kelompok area: Mental, Intelektual, Emosional/ Artistik, Terampil, dan Fisik. Pendidikan dasar lebih menitikberatkan pada pengetahuan dan fungsi praktis. Dalam kurikulum 1964, arah pendidikan mulai masuk ke bidang pragmatisme. Dalam arti bahwa setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah dapat berkorelasi positif dengan fungsi siswa dalam masyarakat. Dalam waktu singkat peralihan dari RIS ke RI tidak memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara komprehensif yang berlaku di seluruh tanah air. Belanda meninggalkan sekolah-sekolah kolonial di daerah-daerah yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia, dan sistem pendidikan akan dilaksanakan secara nasional dengan kapasitas terbatas.

Setelah berdirinya RIS pada bulan Desember 1949, pemerintah RIS dan

pemerintah Indonesia, sebagai inti negara kesatuan dan memiliki aparaturnya yang paling lengkap, menandatangani "Piagam yang disetujui oleh Pemerintah Negara Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia". Piagam ini ditandatangani oleh Perdana Menteri Republik Indonesia, Dr. Moh Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia Dr. A Halim pada tanggal 19 Mei 1950.

Atas dasar piagam ini, ada suatu perkumpulan khusus dengan organisasi pendidikan dan pengajaran Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RIS dan Kementerian Pendidikan, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyelenggarakan " Pemberitahuan umum pada bulan Juni 30 Tahun 1950 berlaku untuk seluruh Indonesia sampai dengan sistem tersebut direvisi. Menerapkan Undang-Undang Dasar Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan dalam orde baru

Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998 dan dapat dilihat sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, telah terjadi lompatan yang sangat penting dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) tentang pendidikan dasar. Namun sangat disayangkan pelaksanaan arahan Presiden ini hanya dilakukan secara kuantitas tetapi tidak proporsional dengan pembangunan secara kualitatif. Yang terpenting saat ini adalah menghasilkan lulusan terdidik sebanyak mungkin tanpa memandang kualitas pendidikan dan prestasi akademik. Pelaksanaan pendidikan pada masa Orde Baru ternyata penuh dengan kendala, karena pendidikan Orde Baru mengusung ideologi "homogenitas" guna menghambat kemajuan di bidang pendidikan. EBTANAS, UMPTN, menjadi pilihan keseragaman intelektual mahasiswa. Dalam pendidikan Orde Baru, tidak mungkin menciptakan pemerataan dalam pendidikan karena unsur dominasi dan ketundukan masih sangat banyak dalam model pendidikan baru Orde. Saat ini, siswa diberikan materi dalam jumlah besar dan berat tanpa mengindahkan batasan untuk memberikan perhatian pada elemen kurikulum lain terhadap kepekaan lingkungan. Beberapa hal negatif lain yang tercipta selama ini adalah produk pendidikan yang ditujukan untuk menjadi pekerja. Dengan demikian, akibat dari hilangnya eksistensi manusia yang hidup dengan akalnyanya (tanpa memanusiaikan manusia), lahirnya manusia yang terdidik secara membosankan dalam kepekaan

sosial, dan banyaknya pemuda yang berpikiran positif, serta hilangnya kebebasan berpendapat.¹⁴

Kurikulum yang digunakan pada masa Orde Baru adalah:

a. Program 1968

Kurikulum 1968 menekankan pendekatan terorganisir untuk mata pelajaran: kelompok pelatihan Pancasila, pengetahuan dasar dan keterampilan khusus. Isi mata kuliah bersifat teoritis dan tidak berkaitan dengan permasalahan aktual di lapangan. Pada titik ini, siswa hanya bertindak sebagai raksasa, hanya menghafal teori-teori yang ada, tanpa penerapan teori apa pun. Aspek emosional dan psikologis tidak disorot dalam kursus ini. Padahal, program ini hanya menekankan pada pembinaan siswa dari segi intelektual.

b. Program 1975

Program 1975 menekankan tujuan, sehingga pengajaran lebih efektif dan efisien berdasarkan MBO (manajemen berdasarkan tujuan). Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Proses Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang dikenal sebagai "unit mata kuliah", yaitu rencana pembelajaran untuk setiap unit pembahasan. Setiap unit pengajaran dibagi menjadi: tujuan pendidikan umum (ATI), tujuan pendidikan khusus (TIC), topik, materi pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan penilaian. Dalam program ini, peran guru menjadi lebih penting, karena setiap guru berkewajiban merinci tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar. Setiap guru harus memiliki rencana yang rinci dalam pelaksanaan program belajar mengajar. Setiap tatap muka sudah diatur sebelumnya dan dijadwalkan. Dengan program ini, semua proses belajar mengajar menjadi sistematis dan progresif.

c. Program tahun 1984.

Program 1984 menggunakan "pendekatan keterampilan berbasis proses". Proses ini menjadi lebih penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran siswa dalam program ini adalah mengamati sesuatu, merakit, berdiskusi, dan melaporkan. Model ini disebut Student Active Learning (CBSA) atau Pembelajaran Siswa Aktif

¹⁴ Lukis Alam and Lukis Alam, "Islamic Education Policy Contestation in the Era of The New Order and the Reformation Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Orde Baru Dan Reformasi," *Ruhamah: Islamic Education Jurnal* 3, no. 2 (2020): 59-79.

(SAL). CBSA melihat guru sebagai fasilitator, sehingga bentuk kegiatan berbasis ceramah tidak lagi ditemukan dalam program ini. Dalam program ini, mahasiswa diposisikan sebagai subjek dalam proses belajar mengajar. Siswa juga berperan dalam pembentukan pengetahuan dengan diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, bertanya dan berdiskusi.

d. Program 1994

Program tahun 1994 merupakan hasil dari upaya memadukan program-program sebelumnya, khususnya program tahun 1975 dan 1984. Dalam program ini, bentuk-bentuk penindasan siswa mulai terjadi dengan beban belajar siswa mulai dari muatan nasional hingga muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, misalnya bahasa seni daerah, keterampilan daerah, dll.¹⁵

Pendidikan di masa reformasi

Periode ini telah menciptakan ruang yang cukup untuk perumusan kebijakan pendidikan revolusioner dan reformasi baru. Format program ini berbasis kompetensi. Demikian pula bentuk penyelenggaraan pendidikan bergeser dari sentralisasi (orde lama) menjadi desentralisasi. Saat itu, pemerintah sedang melakukan ketentuan UUD 1945 dengan mengutamakan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. "Negara memprioritaskan pengeluaran paling sedikit dua puluh persen (20%) dari APBN pada anggaran pendidikan untuk pendapatan dan belanja, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional."¹⁶

Berdasarkan hukum bilangan. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang ditopang oleh hukum digital. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, pendidikan mengarah pada pembangunan daerah, di mana keragaman sangat diperhatikan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan satuan pendidikan. Pendidikan di era reformasi tahun 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22

¹⁵ Saiful Anwar, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia (Zaman Orde Baru Dan Reformasi)," *Al I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 6, no. 2 (2019): 87-91.

¹⁶ Tiara Salwadila, "Sistem Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Pada Era Reformasi," *Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah* 3, no. 2 (2021): 158-63, <https://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/article/view/1196/658>.

Tahun 1999, di mana pendidikan menjadi sektor pembangunan yang terdesentralisasi. Pemerintah telah memperkenalkan model “manajemen berbasis sekolah”. Sementara itu, untuk mengimbangi tuntutan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuatlah sistem “Kurikulum Berbasis Kapabilitas”. Pada tahun 2003, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, dan sejak itu pendidikan dipahami sebagai:¹⁷

“Upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dimana peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan spiritual, pengendalian diri, budi pekerti, kecerdasan hikmat, kepribadian luhur dan keterampilan yang diperlukan bagi diri, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan pada masa doi moi juga tidak sepenuhnya berhasil, karena pemerintah tidak memberikan kebebasan penuh untuk merancang Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokal, misalnya menentukan nilai kelulusan siswa. Kelahiran masih diatur dan diputuskan oleh pemerintah. Walaupun ada aturan yang mengatur kedudukan siswa sebagai mata pelajaran yang sederajat dengan guru, namun dalam penerapannya guru selalu menjadi bagian yang dominan dan dominan dari siswanya, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan proses pendidikan Indonesia masih jauh dari selesai. . seharusnya memperjuangkan hak-hak siswa.¹⁸

Kurikulum yang digunakan pada masa reformasi adalah:

a. Kurikulum Berbasis Kompetensi

Dalam pelaksanaan program ini, posisi mahasiswa kembali ditempatkan sebagai subjek dalam proses pendidikan dengan ruang diskusi terbuka untuk menimba ilmu. Siswa sebenarnya diminta untuk aktif mengumpulkan informasi. Sekali lagi, peran guru diposisikan sebagai fasilitator dalam pengumpulan informasi. Kegiatan pembelajaran menggunakan banyak pendekatan dan metode yang berbeda, sumber belajar tidak hanya guru tetapi juga sumber belajar lain yang

¹⁷ Saeful Anam, “Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 (SISDIKNAS),” *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 9, no. 20 (2018): 115–30.

¹⁸ Maghfuri Amin, “Analisis Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Orde Reformasi (1998-2004),” *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2020): 14–26, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/614/924>.

memenuhi unsur pengajaran. Hal ini mutlak diperlukan karena KBK juga memiliki visi untuk memperhatikan aspek emosional dan psikologis peserta didik sebagai subjek pendidikan.

b. Kurikulum Tingkat Satuan (KTSP) 2006

Secara umum KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaan utamanya terletak pada kewenangan penyusunannya yang mengacu pada hierarki sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan kompetensi inti dan standar kompetensi, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk dapat mengembangkan kurikulum dan penilaian sesuai dengan kebutuhan sekolah dan kabupaten/kota.

Dengan demikian, dalam program ini, sekolah sebagai satuan pendidikan berhak menyusun dan mengembangkan program pengajaran yang sesuai dengan kepentingan siswa dan kepentingan lingkungan. KTSP mempromosikan lebih banyak lokalitas pendidikan. Karena KTSP didasarkan pada pelaksanaan KBK, siswa juga berkesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan secara terbuka berdasarkan sistem atau program yang telah ditentukan oleh sekolah masing-masing. Dalam program ini, unsur-unsur pengajaran dikembalikan ke posisi semula, yaitu unsur teoritis dan praktis. Namun dalam program ini, unsur praktis lebih ditekankan daripada unsur teoritis. Setiap kebijakan yang ditempuh oleh lembaga pendidikan terkecil dalam menentukan metode pembelajaran dan jenis mata pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekitarnya.¹⁹

c. Kurikulum 2013

Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 19 adalah: Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Sedangkan Kurikulum 2013 adalah langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu.²⁶

¹⁹ Eva Tri Cahyanti, "Kebijakan Pendidikan Islam Di Indoensia; Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi," *Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 2, no. 2 (2021): 1-17.

Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi lahir sebagai jawaban terhadap berbagai kritikan terhadap kurikulum 2006, serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dunia kerja. Kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan teknologi seperti yang digariskan dalam haluan negara. Pengembangan kurikulum 2013 didasari oleh pemikiran tentang tantangan masa depan, persepsi masyarakat pengetahuan dan pedagogi, kompetensi masa depan, serta fenomena negatif yang mengemuka. Tujuan dari program 2013 Program 2013 bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia agar mampu hidup beriman, produktif, kreatif, inovatif, efektif dan mampu memberikan sumbangsih bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Dalam hal ini, pengembangan program 2013 difokuskan pada pembangunan keterampilan dan karakter siswa, berupa sintesis dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki siswa yang dapat diungkapkan sebagai bentuk pemahaman konsep yang mereka pelajari secara konseptual.²⁰

Kesimpulan

Terdapat tiga masa dalam kebijakan Pendidikan di paper ini yaitu kebijakan masa orde lama, orde baru dan reformasi. Pada masa orde baru struktur kurikulum berlaku 1945 sampai 1950 orde lama yaitu sebagai pendidikan terendah, pendidikan guru, pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pedagogi teknis, sekolah menengah teknik, pendidikan tinggi, pendidikan tinggi republik, pendidikan tinggi di daerah pendudukan belanda. Pada orde lama terdapat kurikulum tahun 1945 sampai 1968, rencana pelajaran tanpa masalah pada tahun 1952, kurikulum 1964, sedangkan di orde baru kurikulum 1967, 1975, 1984, 1994, sedangkan reformasi berbasis kompetensi, kurikulum ktsp 2006, dan 2013. Dengan demikian kita perlu memahami kebijakan-kebijakan yang terdapat pada orde lama hingga sekarang, untuk mengetahui, sehingga kita tahu sejarah kebijakan Pendidikan masa orde lama hingga reformasi saat ini.

²⁰ Pendekatan Politik and D A N Kebijakan, "Pendidikan Islam Orde Reformasi," *J I A I: Jurnal Ilmu Agama Islam*, no. 20 (n.d.): 22-33.

Daftar Pustaka

- Alam, Lukis, and Lukis Alam. "Islamic Education Policy Contestation in the Era of The New Order and the Reformation Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Orde Baru Dan Reformasi." *Ruhamma : Islamic Education Jurnal* 3, no. 2 (2020): 59-79.
- Anam, Saeful. "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 (SISDIKNAS)." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 9, no. 20 (2018): 115-30.
- Anwar, Saiful. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia (Zaman Orde Baru Dan Reformasi)." *Al I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 6, no. 2 (2019): 87-91.
- Cahyanti, Eva Tri. "Kebijakan Pendidikan Islam Di Indoensia; Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi." *Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 2, no. 2 (2021): 1-17.
- Datumula, Sarfika. "Peraturan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, Dan Kabinet Kerja." *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2021): 56-78.
<https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.27>.
- Fuady, Syafrizal. "Berbagai Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia Pra-Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru (Skb 3 Menteri), Era Reformasi Dan Kecenderungan Masing-Masing Zaman." *TARBIYATUL MISBAH (Jurnal KAJIAN ILMU PENDIDIKAN)* 12, no. 2 (2019): 1-31.
- Herawati, E & Irama. "Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Lembaga Pendidikan DI Indonesia." *TADARUS: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. September (2021): 2086-9118.
- Hoddin, Muhammad Sholeh. "Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi." *Jurnal Ilmiah Iqra'* 14, no. 1 (2020): 15. <https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035>.
- Kosim, Mohammad. "Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Pada Masa Orde Lama." *Karsa* 22, no. 1 (2014).
- Maghfuri Amin. "Analisis Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Orde Reformasi (1998-2004)." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2020): 14-26.
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/614/924>.

- Nurritzqi, Afida. "Karakteristik Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Prespektif Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Dan Sains* 3, no. 1 (2021): 124-41. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>.
- Politik, Pendekatan, and D A N Kebijakan. "Pendidikan Islam Orde Reformasi." *J I A I: Jurnal Ilmu Agama Islam*, no. 20 (n.d.): 22-33.
- Riska, and Hudaidah. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Kondisi Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945 - 1966)." *Jurnal Ilmiah Pendidikan* 3, no. 3 (2021): 824-29.
- Rohman, Miftahur. "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang." *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 02, no. Kebijakan Pendidikan Islam (2018): 15-33.
- Sabarudin, Muhammad. "Pola Dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal Dan Sebelum Kemerdekaan." *TARBIYA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2015): 139-74. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jurnal-tarbiya/article/view/141>.
- Sabiq, A F. "Kebijakan Politik Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Indonesia." *Lentera: Jurnal Diklat Keagamaan Padang* 5, no. 2 (2021): 1-14. <https://lentera.kemenag.go.id/index.php/lentera/article/view/28>.
- Salwadila, Tiara. "Sistem Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Pada Era Reformasi." *Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah* 3, no. 2 (2021): 158-63. <https://ojs.stkipgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/article/view/1196/658>.
- Yuniarti, I, N Khodijah, and ... "Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 9, no. 1 (2022): 182-207. <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/1148>.
- Yuningsih, Heni. "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Ode Baru." *JURNAL TARBIYA Volume: 1, no. 1* (2018): 15-33.
- Zayyini Rusyda, Mustarsyidah. "Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam Di Indonesia." *Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 2 Issue 2, no. Optimalisasi, pendidikan pesantren, kebijakan (2021): 167-80. <http://www.jurnaledukasia.org/index.php/edukasia/article/view/46>.